



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam  
Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian  
Perempuan**

Skripsi

Oleh  
Jessica Ruth Andina  
2017330029

Bandung  
2021



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A  
SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam  
Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian  
Perempuan**

Skripsi

Oleh  
Jessica Ruth Andina  
2017330029

Pembimbing  
Elisabeth Adyningtyas Satya Dewi, Ph.D.

Bandung  
2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**


Nama : Jessica Ruth Andina  
NPM : 2017330029  
Judul : Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam  
Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 22 Januari 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang merangkap anggota**

Sylvia Yazid, Ph.D.

: 

**Sekretaris**

Elisabeth Adyningtyas Satya Dewi, Ph.D.

: 

**Anggota**

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Ruth Andina  
NPM : 2017330029  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia  
dalam Menambah Jumlah Anggota Pasukan  
Perdamaian Perempuan

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Januari 2021



Jessica Ruth Andina

## ABSTRAK

Nama : Jessica Ruth Andina

NPM : 2017330029

Judul : Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan

---

Upaya *peacekeeping* yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dijadikan salah satu cara untuk menciptakan kondisi damai di wilayah berkonflik. Sebagai aktor utama, pasukan perdamaian memiliki peran yang besar dalam keefektifan mandat PBB dalam operasi perdamaian. Sejumlah negara anggota PBB telah menunjukkan kontribusinya dalam mencapai perdamaian dunia ini dengan menyumbangkan pasukan perdamaian baik dari kalangan militer, polisi, dan masyarakat sipil ke daerah berkonflik. Seiring berjalannya waktu, mandat PBB semakin multidimensional, sehingga pasukan perdamaian perempuan menjadi semakin signifikan dalam operasi perdamaian karena perannya yang tidak tergantikan.

Mengingat Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah salah satu lembaga di Indonesia yang selalu mempromosikan Resolusi DK PBB 1325 terkait *Women, Peace, and Security* (WPS), Penulis meneliti lebih jauh mengenai upaya mereka dibawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh lembaga yang dipimpinnya dalam meningkatkan jumlah pasukan perdamaian perempuan. Sehingga pertanyaan penelitian yang akan digunakan untuk dianalisa adalah “Bagaimana Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan?”

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, Penulis menggunakan tiga konsep yaitu kepentingan nasional, pengarusutamaan gender, dan diplomasi. Dalam penelitian yang dilakukan, Penulis menemukan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menaikkan jumlah pasukan perdamaian perempuan. Upaya tersebut termasuk mensosialisasikan agenda WPS kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi lembaga utama penyumbang pasukan perdamaian perempuan, membuat peta jalan Vision 4000 sebagai strategi mencapai 4000 pasukan perdamaian, menginisiasikan Resolusi 2538 dalam presidensi Indonesia di DK PBB, dan juga mengadakan berbagai kerjasama bilateral dan multilateral dengan sejumlah negara.

**Kata kunci:** pasukan perdamaian perempuan, operasi perdamaian PBB, kepentingan nasional, pengarusutamaan gender, diplomasi

## **ABSTRACT**

Name : Jessica Ruth Andina

NPM : 2017330029

Title : Efforts by Indonesian Ministry of Foreign Affairs to Increase the Number of Female Peacekeepers

---

*Peacekeeping efforts carried out by the United Nations are used as a way to create peaceful conditions in conflicted areas. As the main actors, peacekeepers have a big role to play in the effectiveness of the UN mandate in peace operations. A number of UN member countries have shown their contributions in achieving world peace by deploying peacekeepers from the military, police, and civilians to conflict areas. Over the course of time, the UN mandate becomes more multidimensional, causing female peacekeepers to be more significant in peacekeeping operations due to their irreplaceable roles.*

*Considering that Indonesian Ministry of Foreign Affairs is one of the institutions in Indonesia that always promote the UN Security Council Resolutions 1325 on Women, Peace, and Security (WPS), the author examines their efforts under the leadership of Foreign Affairs Minister Retno Marsudi regarding the actions that have been taken by the institution she leads in increasing the number of female peacekeepers. Hence, the research question that will be used to be analyzed is "How are the efforts by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs to Increase the Number of Female Peacekeepers?"*

*To answer the research question, the author uses three concepts namely national interest, gender mainstreaming, and diplomacy. In the research conducted, the author found several efforts that have been made by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs to increase the number of female peacekeepers. These efforts include disseminating the WPS agenda to the Indonesian National Armed Forces and Indonesian National Police which are the main contributing institutions for female peacekeepers, making a Vision 4000 Roadmap as a strategy to reach 4000 peacekeepers, initiating Resolution 2538 in the Indonesian presidency at the UN Security Council, and also holding various bilateral and multilateral collaborations with a number of countries.*

**Keywords:** *female peacekeepers, UN peacekeeping operations, national interests, gender mainstreaming, diplomacy*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan dan tuntunannya saya bisa menyelesaikan skripsi dan perkuliahan di Unpar selama kurang lebih 3,5 tahun ini dengan baik. Semua ini tidak dapat terjadi kalau bukan menurut dengan kehendak, berkat, dan pemberian Tuhan yang melimpah bagi saya.

Penelitian berjudul **“Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan”** merupakan hasil karya yang sangat paling bermakna selama pembelajaran saya di Program Studi Hubungan Internasional Unpar. Penelitian ini berfokus pada upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menambah jumlah pasukan perdamaian perempuan baik dari Indonesia maupun dari negara lain yang berpartisipasi dalam Operasi Perdamaian PBB.

Saya harap penelitian ini bisa menambah pengetahuan pembaca, dan dapat memicu solusi yang realistis yang dapat digunakan oleh pihak terkait dalam menambah jumlah pasukan perdamaian perempuan. Tentunya penelitian ini memiliki banyak kekurangan yang dapat diperbaiki di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat dibutuhkan agar penelitian ini kelak dapat memberikan dampak positif dalam studi Hubungan Internasional.

Bandung, Januari 2021

Jessica Ruth Andina

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Kepada Tuhan Yesus Kristus**

Sebagai penopang dan harapan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat bersyukur atas segala kemurahan dan berkat melimpah yang diberikan-Nya, sampai bisa mencapai titik ini.

### **Keluarga Besar**

Atas segala dukungan dan *support* yang tidak henti-hentinya diberikan kepada Penulis sejak kecil sampai sekarang. *God Bless us all peeps!, and Bulang, this one is for you.*

### **Mbak Nophie**

Yang telah sabar dan perhatian dalam membimbing saya selama kurang lebih satu semester ini. Terima kasih telah memberikan inspirasi dan membuka pikiran saya terhadap banyak hal terutama mengenai gender dan feminisme. *Also, thank you for always encouraging me to write, Mbak!*

### **Mbak Sylvi dan Mbak Mirei**

Selaku penguji Penulis untuk sarannya yang sangat membangun dan membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga lebih komprehensif.



**Ibu Rina Setyawati, Ibu Ardina Desnita, Bapak Reza Wiranataatmadja dari  
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mbak Fitri Bintang dari  
*Centre for Strategic and International Studies***

Para narasumber yang telah meluangkan waktu dikala kesibukan masing-masing untuk melakukan wawancara sehingga saya bisa mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan.

### **Bukit Indah Bonbin**

Kezia, Zizi, Stella, dan Alya yang telah menemani saya dalam hari-harinya di HI Unpar selama kurang lebih 3,5 tahun ini. *I wish you girls the best in life*. Ditunggu reuninya di tempat yang Zizi bisa makan.

### **Warta Himahi**

Seluruh kabinet WH, *I learned a lot from you guys, and I hope we can work again in the future*. Efraim, Lely, Alvin, dan Inez, *thank you for all the help* selama ini di WH.

### **Divisi Feature 2018-2019**

Kak Nanda, Kak Stella, dan Alya, dan Mega terima kasih telah membukakan pintu untuk Jeruth selama di WH dengan bantuan dan *support* yang diberikan.

### **Divisi Feature 2019-2020**

Vianny, Kirana, Feli, Tsabita, Dzaky, dan Aura. Saya banyak belajar dari kalian, dan terima kasih telah menjadi bagian besar dalam hidup saya. Kalau bukan karena kerja keras kalian, apalah konten *Feature* selama 1,5 tahun kebelakang.

### **Senior-senior Penulis**

Kak Kenken, Kak Nanda, Kak Cindy Irawan, Kak Nabila Wade, dan Kak Andita yang ada untuk memberikan saran, bantuan, dan menjawab segala kebingungan saya mengenai perkuliahan, WH, dan magang. Semoga sukses selalu untuk kakak-kakak semuanya.

### **Delegasi La Casa de Prakdip (Kingdom of Spain)**

Untuk Alvin, Alya, Stella, Zizi, Virgi, Tasa, Kezia, dan Tiravy yang telah menemani semester terakhir Jeruth dan memberikan canda tawa selama menjalani *one of the most dreading time of our college life*. Bisa kalik reuni di Barcelona 2035.

*Nothing stood further beyond*

### **Amara Geng**

**Naomi, Rahma, Marvel, Pauline, Ninta, dan Inez yang sudah jadi penghuni “tetap” Amara.**

Terima kasih sudah menjadi *my-go-to people* kalau butuh apa-apa yang mendadak karena tinggal ketok pintu. *Cannot wait for another late night chats and pizza.*

## **Perkumpulan Bimbingan Skripsi Mbak Nophie**

Terutama Mentari, Tasa, dan Cynthia yang sudah mau disusahkan dengan pertanyaan saya. *I couldn't finish this thesis without you guys, so thank you.*

## **HI 2017**

Marvel, Salmadita, Jece, Eden, Wyona, Mimin, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, *you know who you are*. Terima kasih telah mewarnai hari dan membantu saya selama beberapa tahun terakhir.

*At last I want to thank me.*

*Thank you for finishing this part of your life. You have come all this way because well, you rock. You're on to the next phenomenal journey, you got this.*

*Many are the plans in a person's heart, but it is the LORD's purpose that prevails.*

*– Proverbs 19:21.*

*This one is for all 'dem ladies out there,  
you can do it, good luck!*

**2017330029**

***Signing Out.***

## DAFTAR ISI

<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>Iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AKRONIM</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	7
1.2.3 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran .....	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
1.6.1 Metode Penelitian .....	17
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.7 Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: PASUKAN PERDAMAIAN PEREMPUAN DAN PANDANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA</b> .....	<b>21</b>
2.1 Operasi Perdamaian PBB .....	21
2.2 Perkembangan Anggota Perempuan dalam Pasukan Perdamaian PBB .....	24
2.3 Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia dalam Operasi Perdamaian PBB .....	30

2.4 Pandangan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai Pasukan Perdamaian Perempuan .....	33
2.5 Tantangan dan Peluang Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan .....	35
<b>BAB III: UPAYA-UPAYA KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENAMBAH JUMLAH ANGGOTA PASUKAN PERDAMAIAN PEREMPUAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Pengarusutamaan Gender dalam Kementerian Luar Negeri Indonesia .....	43
3.2 Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Pasukan Perdamaian Perempuan .....	46
3.2.1 Selalu Mendorong Agenda <i>Women, Peace, and Security</i> dalam Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian .....	46
3.2.2 Membuat <i>Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019..</i>	50
3.2.3 Menginisiasi Pencetusan Resolusi 2538 Mengenai Peran Perempuan dalam Operasi Perdamaian di Dewan Keamanan PBB	53
3.2.4 Kerjasama dengan Negara Lain .....	56
3.3 Hasil dari Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Pasukan Perdamaian Perempuan .....	59
<b>BAB IV: KESIMPULAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 2.1</b> Jumlah Pasukan Perdamaian Perempuan dalam Operasi Perdamaian PBB (Agustus 2015-Agustus 2020) .....	27
<b>Grafik 2.2</b> Perbandingan Pasukan Perdamaian Laki-Laki dengan Pasukan Perdamaian Perempuan dalam Operasi Perdamaian PBB (Agustus 2015 - Agustus 2020) .....	27
<b>Grafik 3.1</b> Jumlah Pasukan Perdamaian Perempuan dan Laki-Laki dari Indonesia (Agustus 2015-Agustus 2020) .....	62
<b>Grafik 3.2</b> Perbandingan Pasukan Perdamaian Laki-Laki dengan Pasukan Perdamaian Perempuan dalam Operasi Perdamaian PBB (Agustus 2015 - Agustus 2020) .....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Pertanyaan Wawancara dengan Kementerian Luar Negeri  
Indonesia dan Ibu Fitri Bintang Timur

## DAFTAR AKRONIM

ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
DK PBB	:	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa
FPU <sub>s</sub>	:	<i>Formed Police Units</i>
IAWP	:	International Association of Women Police
IPSC	:	Indonesian Peace and Security Center
Kemlu	:	Kementerian Luar Negeri Indonesia
Menlu	:	Menteri Luar Negeri Indonesia
PBB	:	Perserikatan Bangsa Bangsa
PMPP-TNI	:	Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PUG	:	Pengarusutamaan Gender
TKMPP	:	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945
WPS	:	<i>Women, Peace, and Security</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persatuan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang dibentuk di tahun 1945 yang memiliki misi utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Namun, dalam perdamaian tersebut tidak dapat selalu terjadi dan adanya konflik di beberapa negara. Dalam menjalankan misi perdamaianya, PBB menciptakan tiga upaya yang dilakukan untuk mencapai perdamaian tersebut yaitu dengan *peacemaking*, *peacebuilding*, dan *peacekeeping*.<sup>1</sup>

Upaya *peacekeeping* ini telah terbukti menjadi salah satu upaya yang efektif untuk membantu negara tuan rumah (*host countries*) dalam menjalankan masa yang sulit dari konflik menjadi damai.<sup>2</sup> Selama lebih dari enam puluh tahun, misi PBB dalam *peacekeeping* ini adalah seperti; mencegah konflik, membangun institusi domestik,<sup>3</sup> melindungi masyarakat sipil, mempromosikan hak asasi manusia, dan membantu dalam pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi yang akan dilakukan *host country* yang sedang berkonflik.

---

<sup>1</sup> A.B. Fetherston, *Towards a Theory of United Nations Peacekeeping* (New York: St Martin's Press, 1994), 124.

<sup>2</sup> "What is peacekeeping?," *United Nations Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping> (diakses pada 3 Januari 2021).

<sup>3</sup> Sabrina Karim dan Kyle Beardsley, *Equal Opportunity Peacekeeping : Women, Peace, and Security in Post Conflict States* (New York: Oxford University Press, 2017), 13.

Operasi perdamaian ini dimandatkan langsung oleh DK PBB melalui sebuah resolusi.<sup>4</sup> DK PBB akan menentukan berapa banyak pasukan yang dibutuhkan suatu negara, lalu kantor pusat PBB akan berkoordinasi dengan negara-negara yang memiliki pasukan perdamaian agar dapat segera dikirimkan. Para pasukan perdamaian ini merupakan para anggota militer, kepolisian, dan masyarakat sipil dari 120 negara yang mayoritas dari negara-negara di Afrika dan Asia. Para pasukan perdamaian sudah mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

DK PBB memiliki 10 anggota, yaitu 5 anggota tetap dan 5 anggota tidak tetap. Pada Bulan Juni 2018, Indonesia ditetapkan menjadi salah satu anggota tidak tetap DK PBB untuk keempat kalinya.<sup>5</sup> Indonesia menjadi anggota tidak tetap dari 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2020. Isu yang diangkat Indonesia setelah mengemban status ini pada dasarnya adalah meningkatkan *peacekeeping* dan *peacebuilding* sehingga memelihara perdamaian dunia. Dari berbagai isu yang telah menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh Indonesia tersebut, salah satu diantaranya adalah meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam proses perdamaian.

---

<sup>4</sup> “Military,” *United Nations Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en/military> (diakses pada 6 Februari 2020).

<sup>5</sup> “Keanggotaan Indonesia pada DK PBB,” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 8 April 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb) (diakses pada 6 Februari 2020).

Meningkatkan jumlah partisipasi pasukan perdamaian perempuan menjadi salah satu agenda prioritas yang didesak oleh DK PBB yang juga tertuang dalam Resolusi 1325 mengenai *Women, Peace, and Security* yang diadopsi pada tahun 2000.<sup>6</sup> Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menerima dan mengadopsi resolusi DK PBB tersebut. Pada tahun 2019, pasukan perdamaian perempuan mencapai 100.000 personil yang beranggotakan 4,4% dari militer dan 11,1% polisi. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan pada tahun 1993 dimana persentase pasukan perdamaian perempuan PBB hanya sebesar 1%. Bahkan dari tahun 1957 sampai 1989, jumlah pasukan perdamaian perempuan hanya 20 anggota.<sup>7</sup> Keinginan untuk menambah jumlah pasukan perdamaian perempuan dikarenakan peran mereka yang tidak kalah penting dari pasukan perdamaian laki-laki. Jumlah pasukan perdamaian perempuan memang tidak dapat diatur oleh PBB, karena kuota pengiriman pasukan perdamaian perempuan sendiri bergantung pada kebijakan pemerintah yang akan mengirimkan pasukan perdamaian.<sup>8</sup>

Pasukan perdamaian perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam negara yang sedang berkonflik seperti memberdayakan perempuan di negara tujuan, mewawancarai korban kekerasan karena akan merasa lebih nyaman berbicara dengan pasukan perdamaian perempuan dibanding laki-laki, berinteraksi dengan perempuan di komunitas yang melarang perempuan berbicara dengan laki-

---

<sup>6</sup> “Military,” *United Nations Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en/military> (diakses pada 6 Februari 2020).

<sup>7</sup> Karim dan Beardsley, *Equal Opportunity Peacekeeping*, 17.

<sup>8</sup> “Women in Peacekeeping,” *United Nations Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping> (diakses pada 7 Februari 2020).

laki, meningkatkan akses dan dukungan keamanan untuk perempuan lokal, dan menjadi panutan bagi para perempuan di negara berkonflik tersebut.<sup>9</sup> Keberadaan pasukan perdamaian perempuan juga menaikkan efektivitas operasi perdamaian sehingga mandat PBB menjadi lebih berhasil.<sup>10</sup> Namun, banyaknya peran pasukan perdamaian perempuan tidak dapat diimbangi dengan jumlah pasukan perdamaian perempuan yang sekarang jumlahnya masih timpang karena berbagai hambatan yang dihadapi negara penyumbang pasukan perdamaian, termasuk Indonesia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sebagai lembaga dari Indonesia yang selalu mempromosikan penting peran dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, Penulis meninjau upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, dibawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam menambah jumlah pasukan perdamaian perempuan yang akan dikirimkan ke Operasi Perdamaian PBB. Meskipun demikian, dalam bagian analisa upaya tersebut menjadi batu loncatan bagi Kemlu untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya pasukan perdamaian perempuan, yang nantinya akan berdampak pada kenaikan jumlah anggota pasukan perdamaian perempuan.

---

<sup>9</sup> Leonard F. Hutabarat, "Indonesian Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission," *Jurnal Pertahanan* 3, No.3 (2017): 191.

<sup>10</sup> "The Crucial Role of Women as Agents of Peace, Tolerance, and Prosperity," *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*, 29 Mei 2019, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/343/view/the-crucial-role-of-women-as-agents-of-peace-tolerance-and-prosperity> (diakses pada 3 Januari 2021).

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Pada tahun 2000, DK PBB telah menetapkan Resolusi 1325 tentang *Women, Peace, and Security*, yang menegaskan peran perempuan yang sangat penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik, negosiasi, *peacebuilding*, dan tentunya *peacekeeping*. Perempuan dibutuhkan sama besarnya dengan laki-laki dalam mempromosikan keamanan dan perdamaian. Resolusi ini merupakan sebuah mandat yang diberikan oleh dewan keamanan kepada semua negara anggota PBB.<sup>11</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang sering mengirimkan pasukan perdamaian ke negara yang sedang berkonflik tentunya sadar terhadap hal ini. Pada Agustus 2015, dari 2.727 anggota pasukan perdamaian dari Indonesia yang dikirimkan ke operasi perdamaian, hanya 31 anggota<sup>12</sup> adalah perempuan, jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah pasukan perdamaian laki-laki. Kurangnya jumlah pasukan perdamaian perempuan inilah yang menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi Indonesia dan juga negara kontributor pasukan perdamaian mengingat peran pasukan perdamaian perempuan yang sangat penting terhadap keberlangsungan Operasi Perdamaian PBB. Sehingga, Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkomitmen untuk menaikkan jumlah anggota pasukan

---

<sup>11</sup> "Landmark resolution on Women, Peace, and Security," *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women*, <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/> (diakses pada 7 Februari 2020).

<sup>12</sup> "Troop and Police Contributors," *United Nations Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors> (diakses pada 29 November 2020).

perdamaian perempuan, sesuai dengan agenda WPS yang telah dibuat sekitar 20 tahun lalu.

Berangkat dari banyaknya peran pasukan perdamaian perempuan yang signifikan untuk menjamin keberhasilan sebuah operasi perdamaian,<sup>13</sup> ditambah dengan adanya keinginan Indonesia yang terus berkomitmen terhadap Resolusi DK PBB 1325 mengenai WPS, dan keinginan untuk menaikkan jumlah pasukan perdamaian perempuan, Penulis melakukan penelitian mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Kemlu mengenai pentingnya peran pasukan perdamaian perempuan, dari tahun Agustus 2015-Agustus 2020. Mengingat batasan otonomi yang dimiliki Kemlu yang tidak punya otoritas untuk secara langsung menambah jumlah pasukan perdamaian perempuan, maka beberapa upaya tersebut dijadikan sebagai cara bagi Kemlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) berbagai pihak yang turut andil dalam pengiriman pasukan perdamaian perempuan. Setelah itu, maka kenaikan jumlah pasukan perdamaian perempuan baru bisa terlihat, lalu untuk menindaklanjutinya maka peningkatan kapasitas bagi pasukan perdamaian perempuan dilakukan untuk meningkatkan *skill* yang akan mereka tunjukkan dan berikan di operasi perdamaian.

---

<sup>13</sup> “The Crucial Role of Women as Agents of Peace, Tolerance, and Prosperity,” *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*, 29 Mei 2019, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/343/view/the-crucial-role-of-women-as-agents-of-peace-tolerance-and-prosperity> (diakses pada 29 Maret 2020).

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menambah jumlah pasukan perdamaian perempuan. Upaya yang dimaksud dari Bulan Agustus 2015 sampai Agustus 2020, karena di tahun tersebut merupakan beberapa bulan setelah Menlu Retno Marsudi menjabat. Sebagai Menlu perempuan pertama Indonesia, Menlu Retno semakin menggalakkan agenda WPS dalam kementeriannya. Hal ini dikarenakan bukan karena beliau adalah seorang perempuan, namun beliau sempat mengatakan bahwa ia percaya akan potensi perempuan sebagai bagian dari solusi sebuah permasalahan.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dijawab oleh penulis adalah *“Bagaimana Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan?”*

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam meningkatkan jumlah pasukan perdamaian perempuan Indonesia dalam Operasi Perdamaian PBB.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah menambah referensi mengenai pasukan perdamaian di Indonesia, terutama lebih sadar akan kurangnya jumlah partisipasi perempuan dalam Operasi Perdamaian PBB di berbagai negara. Pembaca juga diharapkan dapat lebih mengerti akan pentingnya peran pasukan perdamaian perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi seluruh kalangan masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam aspek keamanan dan perdamaian global. Untuk pembuat kebijakan terutama Kemlu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat terus menerapkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembuatan kebijakan maupun rencana kedepannya, agar tidak bias gender sehingga kepentingan semua kalangan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain yang akan menulis tentang pasukan perdamaian perempuan PBB dari Indonesia maupun dari negara lain.

### **1.4 Kajian Literatur**

Dalam mengangkat topik tentang pasukan perdamaian perempuan dalam Operasi Perdamaian PBB, maka penulis menggunakan beberapa buku dan jurnal untuk dikaji lebih dalam lagi seiring dengan topik yang menjadi penelitian.

Referensi pertama adalah buku *Equal Opportunity Peacekeeping: Women, Peace, and Security in Post-Conflict States* karya Sabrina Karim dan Kyle Beardsley yang lebih menjelaskan mengenai pentingnya peran pasukan perdamaian



perempuan dalam operasi perdamaian. Dalam buku ini dijelaskan perkembangan menegakkan kesetaraan gender dalam PBB terutama dalam operasi perdamaian. Karim dan Beardsley menyatakan bahwa perempuan dalam operasi perdamaian sebenarnya sangat membantu. Berbeda dengan referensi lainnya, Karim dan Beardsley berargumen bahwa dengan adanya pasukan perdamaian perempuan di negara konflik, menjadi salah satu cara untuk memasukkan ide kesetaraan gender ke dalam lingkungan. Salah satu contoh kasus adalah pengiriman pasukan perdamaian yang semuanya perempuan, yang telah dikirimkan oleh India dan Bangladesh. Adanya pengiriman ini terbukti menghasilkan adanya peningkatan substantif terhadap kesetaraan gender di negara tujuan, yaitu Liberia, Haiti, dan Kongo.<sup>14</sup> Buku ini berguna bagi penulis dalam menjelaskan akar permasalahan dari mengapa sangat sedikit sekali jumlah pasukan perdamaian perempuan di dunia.

Sumber berikutnya adalah artikel karya dari Leonard F. Hutabarat yang berjudul *Indonesian Female Peacekeepers in the United Nations Peacekeeping Mission*, yang dimuat dalam Jurnal Pertahanan. Artikel jurnal ini juga mengemukakan bahwa peran perempuan sangat penting dalam Operasi Perdamaian PBB, sama seperti buku karya Karim dan Beardsley. Dalam artikel ini, Hutabarat memiliki pandangan bahwa peran pasukan perdamaian perempuan dalam operasi perdamaian dapat menjadi contoh positif bagi perempuan lokal di daerah konflik, misalnya menjadi mentor bagi para calon pasukan perdamaian perempuan yang

---

<sup>14</sup> Sabrina Karim dan Kyle Beardsley, *Equal Opportunity Peacekeeping: Women, Peace, and Security in Post-Conflict States* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 14-18.

kedepannya akan dikirim ke negara berkonflik. Peran pasukan perdamaian perempuan yang menurutnya paling penting adalah mampu mendapatkan informasi yang berguna bagi operasi perdamaian terutama melalui perempuan dan anak-anak. Peran yang penting ini dapat dilakukan oleh pasukan perdamaian perempuan karena keberadaan mereka menimbulkan rasa percaya dan aman dibanding pasukan perdamaian laki-laki.<sup>15</sup> Artikel ini berguna bagi penulis untuk menambah informasi mengenai peran yang dilakukan oleh pasukan perdamaian perempuan saat berada di negara berkonflik yang dituju, menambah referensi dari Karim dan Beardsley.

Referensi berikutnya adalah dari buku berjudul *Global Gender Issues in the New Millenium* karya Anne Sisson Runyan dan V. Spike Peterson. Buku ini lebih membahas mengenai permasalahan gender yang dialami selama operasi perdamaian yang kerap kali terjadi di wilayah konflik. Meskipun tidak mengikat, PBB selalu mendorong negara anggota untuk melakukan beberapa hal seperti; melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender yang berada di wilayah konflik, mengikutsertakan perempuan dalam negosiasi perdamaian, dan menyediakan pelatihan yang sensitif-gender terhadap pasukan perdamaian perempuan. Namun Resolusi 1325 yang juga dikeluarkan oleh PBB tidak diindahkan, dibuktikan oleh banyaknya kasus pelecehan dan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh pasukan perdamaian. Seiring berjalannya waktu, penulis menganggap bahwa analisa mengenai gender dan perempuan dapat menjadi bagian

---

<sup>15</sup> Leonard F. Hutabarat, "Indonesian Female Peacekeepers in the United Nations Peacekeeping Mission," *Jurnal Pertahanan* 3, no.3 (2017): 185-206.

dari solusi berbentuk program yang menjadi bagian dari PBB terhadap penanganan konflik dan ketidakamanan di seluruh dunia. Buku ini berfungsi untuk menjelaskan hambatan yang dialami oleh negara pengirim pasukan perdamaian perempuan yang membuat upaya untuk menaikkan pasukan perdamaian perempuan menjadi tidak efektif.

Referensi keempat yang penulis gunakan adalah dari salah satu artikel Jurnal Global: Jurnal Politik Internasional dengan *judul The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India, and the Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions* karya Fitri Bintang Timur. Seperti judulnya, artikel jurnal ini berisikan penelitian sang penulis tentang kondisi tiga negara mengenai pasukan perdamaian perempuan di negaranya masing-masing. Artikel jurnal ini memiliki pandangan yang sama seperti referensi lainnya terhadap posisi perempuan dalam operasi perdamaian yang dilakukan PBB, dimana jumlah pasukan perdamaian perempuan masih sangat sedikit dibanding laki-laki karena adanya pandangan dimana perempuan lebih pantas untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mengurus anak, bukan untuk berperang. Walaupun ada perempuan yang bekerja dalam sektor keamanan seperti pasukan perdamaian, maka ia akan dilihat kurang bernilai dibanding pasukan perdamaian laki-laki. Stereotip dimana laki-laki adalah pejuang dan perempuan harus dilindungi inilah yang membuat pekerjaan pasukan perdamaian didominasi oleh laki-laki.<sup>16</sup> Artikel jurnal

---

<sup>16</sup> Fitriani Bintang Timur, "The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India, and the Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions," *Global: Jurnal Politik Internasional* 18, No.1 (2016): 51-75.

ini sama seperti buku karya Runyan dan Peterson, dimana menjelaskan mengenai hambatan yang dihadapi dalam menaikkan peran perempuan di operasi perdamaian. Namun, berbeda dengan referensi penulis lainnya yang hanya memberikan gambaran luas mengenai perempuan yang ada dalam bidang keamanan internasional, artikel ini membantu penulis untuk melihat lebih dekat tentang mengapa Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian yang jumlahnya lebih sedikit dibanding kedua negara lainnya. Artikel jurnal ini memaparkan berbagai hambatan yang dialami Indonesia dalam menciptakan kesetaraan gender di kalangan pasukan perdamaian, dimana dalam referensi lainnya tidak disebutkan.

Posisi penulis dalam penelitian berbeda dengan keempat literatur yang sudah disebutkan sebelumnya. Penelitian ini akan lebih fokus pada upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menambah jumlah pasukan perdamaian perempuan dari Agustus 2015 - Agustus 2020. Meskipun demikian, penulis menggunakan empat literatur di atas sebagai referensi dalam penulisan penelitian. Penelitian juga akan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik pasukan perdamaian perempuan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep sebagai kerangka pemikiran. Pertama adalah konsep kepentingan nasional, yang merupakan kebutuhan dan keinginan yang dinilai penting oleh sebuah negara dalam

berhubungan dengan negara lain yang ada dalam lingkungan internasional.<sup>17</sup> Konsep ini membicarakan mengenai kepentingan nasional secara utuh, bukan kepentingan sebuah organisasi politik, kelompok swasta, maupun birokrat.<sup>18</sup>

*Peacekeeping* menjadi salah satu saluran bagi sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dukungan kepentingan nasional melalui status quo dalam arena internasional sangat menarik bagi negara *middle-power* karena banyak kekuatan yang bisa mereka dapatkan. Kepentingan negara *middle-power* dapat direalisasikan karena *status quo* yang dapat mereka peroleh baik secara kemakmuran maupun pengaruh. Sehingga, bagi negara *middle-power* partisipasi dalam upaya *peacekeeping* PBB dapat bermanfaat bagi kepentingan untuk melindungi sistem internasional dan juga mempertahankan kedudukan terakhir atau mencoba mencapai posisi yang diinginkan.<sup>19</sup>

Konsep selanjutnya yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pengarusutamaan gender atau yang lebih dikenal dengan *gender mainstreaming*. Muncul sebagai konsep dalam pembangunan global pada tahun 1980 an, konsep ini semakin lama menjadi konsep yang digunakan dalam beberapa organisasi internasional seperti PBB dan World Bank.<sup>20</sup> Menurut Daly, PUG dinilai sebagai

---

<sup>17</sup> Donald E. Nuechterlein, "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making," *British Journal of International Studies* 2, No.3 (1976): 247

<sup>18</sup> Nuechterlein, "National Interest and Foreign Policy," 247.

<sup>19</sup> Laura Neack, "UN Peace-Keeping: In the Interest of Community or Self?," *Journal of Peace Research* 32, No. 2 (1995): 184.

<sup>20</sup> Laura J. Shepherd, *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relation* (New York: Routledge, 2015), 229.

pendekatan modern terhadap kesetaraan gender yang menjadi model pembuatan kebijakan.<sup>21</sup> Tujuan utama dari PUG sendiri adalah untuk mencapai kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi ini seperti memperhatikan praktik dan norma yang peka terhadap gender dalam struktur, proses, dan lingkungan pembuatan kebijakan.<sup>22</sup> Pengarusutamaan ini dilakukan agar semua kebijakan yang diambil telah dilakukan analisis mengenai kebijakan tersebut baik dari terhadap laki-laki dan juga perempuan.

Banyak negara sudah mulai menyebarkan strategi ini ke seluruh unit dan departemen dalam negaranya. Munculnya konsep ini membuat bergesernya pandangan pembuat kebijakan yang melihat perempuan sebagai korban sebagai permasalahan menjadi perempuan sebagai aktor yang dapat menjadi solusi dari ketidaksetaraan itu sendiri.<sup>23</sup> Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam perbedaan laki-laki dan perempuan, dan bagaimana perbedaan tersebut seharusnya menjadi bagian utama dari pembuatan kebijakan. PUG memiliki potensial untuk menyeimbangkan pengertian gender dan hegemoni maskulin yang ada.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Mary Daly, "Gender Mainstreaming in Theory and Practice," *Social Politics: International Studies in Gender, State, & Society* 12, No.3 (2005): 433.

<sup>22</sup> Daly, "Gender Mainstreaming in Theory and Practice," 435

<sup>23</sup> Anne S. Runyan dan V. Spike Peterson, *Global Gender Issues in the New Millenium* (Colorado: Westview Press, 2014), hal 125.

<sup>24</sup> Shepherd, *Gender Matters in Global Politics*, hal. 235.

Beveridge dan Nott mengemukakan ada dua model dalam pengimplementasian PUG, yaitu *technocratic* dan *participatory*. PUG *technocratic* bergantung pada spesialis gender atau para birokrat dalam organisasi yang mendorong proses pengintegrasian gender dalam kebijakan dan program yang dilakukan, serta menjadikan pengarusutamaan gender ini sebagai sebuah ‘rutinitas’ dalam sebuah lembaga negara.<sup>25</sup> Sedangkan model *participatory* dalam konsep ini, menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang sensitif gender.<sup>26</sup> Model *participatory* ini merupakan sejumlah individu atau organisasi yang mendorong asesmen terhadap dampak gender yang menginginkan adanya akses terhadap pembuatan kebijakan dan ingin mendapatkan akuntabilitas para pembuat kebijakan.<sup>27</sup>

Selanjutnya, penulis menggunakan konsep diplomasi. Diplomasi dilakukan dengan cara bertukar informasi secara terus menerus dengan negara lain untuk mempersuasi tingkah laku negara lain.<sup>28</sup> Cara ini dilakukan oleh negara demi menciptakan hubungan damai antara negara yang ada di dunia. Tujuan utama dari diplomasi yang dilakukan suatu negara adalah agar mendapatkan kepentingan nasional mereka terhadap sesuatu, tanpa kekerasan, hukuman, atau propaganda.<sup>29</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam diplomasi adalah seperti mengumpulkan informasi,

---

<sup>25</sup>

<sup>26</sup> Ibid., hal 231.

<sup>27</sup> Fiona Beveridge, Sue Nott, dan Kylie Stephen, “Mainstreaming and the engendering of policy making: a means to an end?” *Journal of European Public Policy* 7, No.3 (2000): 390.

<sup>28</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal 14.

<sup>29</sup> G.R. Berridge, *Diplomacy Theory and Practice* (London: Palgrave Macmillan, 2010), hal 1.

memperjelas intensi suatu negara, melahirkan niat baik, dan juga untuk bernegosiasi.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya, konsep diplomasi memiliki beberapa bentuk; beberapa diantaranya adalah diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral merupakan jenis diplomasi yang paling klasik<sup>31</sup> yang telah digunakan sejak lama dimana mengacu pada hubungan politik dan budaya yang dilakukan oleh dua negara.<sup>32</sup> Terciptanya sebuah hubungan diplomatik sebuah negara, merupakan sebuah persetujuan bersama antara kedua negara. Selain itu ada pula diplomasi multilateral yang dimulai karena pada abad ke-20 sudah mulai banyak dilakukan kegiatan diplomasi dengan wadah konferensi internasional, yang diikuti oleh paling sedikit tiga negara atau lebih, sehingga dinamakanlah diplomasi multilateral.<sup>33</sup> Menurut Djelantik, dalam berbagai kesempatan dan situasi, diplomasi multilateral memberi kemungkinan paling besar untuk berhasilnya suatu negosiasi yang dilakukan<sup>34</sup> Banyaknya kepentingan negara yang dibawa oleh masing-masing negara pada saat konferensi dilakukan, diplomasi multilateral dirasa menjadi upaya yang dipilih untuk mengatasi suatu masalah sehingga ditemukan jalan keluarnya.<sup>35</sup> Dalam kegiatan diplomasi yang dilakukan, penting untuk memperoleh kepercayaan di dalam negeri dan juga di lingkungan internasional. Cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kepercayaan tersebut

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Noe Cornago, "Diplomacy," *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict*, 576.

<sup>32</sup> Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, hal 85.

<sup>33</sup> Ibid., 133.

<sup>34</sup> Ibid., 136.

<sup>35</sup> Ibid., 137.



adalah dengan prosedur “diplomasi terbuka,” agar menjadi sorotan masyarakat. Prosedur “diplomasi terbuka” ini juga meningkatkan kemungkinan pengaruh terhadap negara-negara kecil, meskipun kemampuannya terbatas.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif berfungsi untuk menggali dan memahami individu atau kelompok tentang suatu permasalahan sosial.<sup>36</sup> Penelitian ini lebih menganalisa tentang fenomena sosial yang terjadi di suatu waktu. Penulis meminjam gagasan atau ide yang dimiliki oleh orang-orang yang diteliti terkait dengan topik, yang kemudian dimaknai dan dianalisis sebagai sebuah penelitian. Metode penelitian kualitatif bergantung pada interpretasi penulis saat mendapatkan data, dalam penelitian ini, penulis akan lebih mengarah kepada *second-order interpretation* yaitu sudut pandang peneliti yang melakukan penelitian tersebut, serta *third-order interpretation* yang artinya interpretasi kualitatif yang dimaknai oleh pembaca laporan penelitian.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kemlu dalam menambah jumlah anggota pasukan perdamaian

---

<sup>36</sup> John C. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (California: SAGE Publications, 2009).

<sup>37</sup> Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 111.

perempuan. Penulis mengumpulkan beberapa data dari beberapa sumber yang *valid*, kemudian dideskripsikan lagi melalui teks sesuai topik penelitian.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga penulis akan menggunakan sumber dokumen seperti buku dan jurnal. Selain itu, penulis menggunakan sumber media seperti *website* yang terpercaya agar mendukung argumen yang ada dalam buku dan jurnal dengan berita-berita yang terkini. Dalam membuat penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan tiga narasumber dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu, Ibu Rina Setyawati sebagai Kepala Sub Direktorat Perdamaian dan Keamanan Internasional, serta Bapak Reza Wiranataatmadja dan Ibu Ardina Desnita sebagai *staff* Subdit Perdamaian dan Keamanan Internasional, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri Indonesia. Selain itu, penulis juga mewawancarai peneliti dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Ibu Fitri Bintang Timur, yang pernah meneliti dan mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai pasukan perdamaian perempuan di beberapa jurnal. Data dari wawancara tersebut menjadi sumber untuk analisis kualitatif yang dilakukan dan memberikan wawasan baru kepada penulis dan pembaca.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, 152.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 bab:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bagian pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II: Pasukan Perdamaian Perempuan dan Pandangan Kementerian Luar Negeri Indonesia**

Dalam bab kedua membahas mengenai perkembangan jumlah perempuan dalam Operasi Perdamaian PBB, lalu peran pasukan perdamaian perempuan yang berbeda dengan pasukan perdamaian laki-laki. Setelah itu dilanjutkan dengan pandangan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai pasukan perdamaian perempuan, dan juga penulis memaparkan berbagai alasan mengapa pasukan perdamaian perempuan jumlahnya masih sedikit dalam bagian tantangan dan peluang.

### **Bab III: Upaya-upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan**

Bab tiga menganalisis berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk menambah jumlah anggota pasukan perdamaian perempuan yang akan dikirimkan

ke Operasi Perdamaian PBB dan bagaimana upaya tersebut akan memenuhi kepentingan nasional Indonesia.

#### **Bab IV: Kesimpulan**